

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi

Herawati¹ Roida Nababan²

Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: herawati.herawati@student.uhn.ac.id¹ roidanababan081@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab notaris dalam pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi, dengan fokus pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan akta yang dibuatnya sah dan bebas dari kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris serta implikasi hukum yang timbul akibat pembatalan akta otentik berdasarkan kesalahan substansi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan substansi yang terjadi dalam akta otentik yang ditandatanganinya, serta pentingnya pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Pembatalan Akta Otentik, Kesalahan Substansi

Abstract

This research discusses the responsibility of notaries in canceling authentic deeds caused by substantive errors, with a focus on cases that occurred at the Medan District Court. Cancellation of an authentic deed due to substantive errors can be detrimental to the parties involved in the agreement. In this context, the notary has a legal responsibility to ensure that the deed he makes is valid and free from errors. This research aims to analyze the responsibilities of notaries and the legal implications arising from the cancellation of authentic deeds based on substantive errors. The method used is a normative approach using literature study. The research results show that notaries must be responsible for substantive errors that occur in the authentic deeds they sign, as well as the importance of supervision and counseling to prevent similar errors from occurring in the future.

Keywords: Notary's Responsibility, Cancellation of Authentic Deed, Substantive Error



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris memainkan peran sentral dalam sistem hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik yang berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat dan diakui. Akta otentik, yang dibuat oleh notaris, kekuatan eksekutorial dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab notaris meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta adalah akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, kesalahan substansi dalam akta dapat terjadi, baik karena kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi data, kesalahpahaman dalam komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, atau faktor lain yang tidak terduga. Ketika kesalahan tersebut terungkap, dapat menimbulkan sengketa yang mengarah pada pembatalan akta di pengadilan. Berbagai kasus pembatalan akta otentik akibat kesalahan substansi telah dihadapi, yang menunjukkan kompleksitas tanggung jawab notaris dalam konteks hukum. Pembatalan akta tidak hanya berdampak pada keabsahan dokumen saja akan tetapi juga mempengaruhi kepentingan hukum para pihak yang mengandalkan akta tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris tidak hanya mencakup pembuatan akta, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak pihak

ketiga yang mungkin terpengaruh. Pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris dalam menghadapi kesalahan substansi menjadi relevan, terutama dalam konteks hukum yang semakin kompleks. Dalam kajian ini, akan dibahas bagaimana tanggung jawab notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terkait dengan pembatalan akta otentik. Selain itu, akan dianalisis implikasi hukum bagi notaris ketika menghadapi kesalahan substansi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi risiko di masa depan. Pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab notaris dalam konteks ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktik notariat dan meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam proses peradilan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi persyaratan yang sah dan benar. Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan substansi dalam akta otentik yang dapat menyebabkan pembatalan akta tersebut. Pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan akta otentik, serta bagaimana pembatalan akta akibat kesalahan substansi diputuskan.

Rumusan Masalah

1. Langkah-Langkah apa yang dapat diambil oleh notaris untuk meminimalkan risiko kesalahan substansi dan melindungi kepentingan para pihak?
2. Bagaimana pengadilan negeri Medan menangani kasus pembatalan akta otentik akibat kesalahan substansi?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Otentik?

Tinjauan Pustaka

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat untuk membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bertugas untuk menyusun akta, mengesahkan tanda tangan, dan melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh notaris dan memenuhi syarat formal tertentu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Akta ini dianggap sebagai bukti yang kuat atas peristiwa hukum yang terjadi. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan publik terhadap dokumen hukum. Kesalahan substansi dalam akta dapat mengakibatkan pembatalan akta, yang menegaskan perlunya kehati-hatian dan profesionalisme dalam praktik notaris. Pembatalan ini tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan implikasi hukum yang lebih luas bagi sistem hukum secara keseluruhan;

1. Kesalahan Substansi dalam Akta Otentik. Kesalahan substansi dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau ketidakakuratan dalam isi akta yang berkaitan dengan fakta hukum. Contoh kesalahan substansi mencakup: Ketidakakuratan identitas para pihak (nama, alamat, status hukum). Kesalahan dalam deskripsi objek perjanjian (misalnya, objek yang tidak sesuai dengan kesepakatan). Kesalahan dalam penulisan ketentuan hukum yang relevan. Kesalahan substansi ini dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan hukum dan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat

2. **Tanggung Jawab Notaris.** Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik mencakup: **Tanggung Jawab Profesional:** Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Jika terjadi kesalahan substansi, notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. **Tanggung Jawab Hukum:** Berdasarkan Pasal 16 UU Notaris, notaris bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab ini bisa berujung pada tuntutan ganti rugi jika terbukti ada kelalaian.
3. **Prosedur Pembatalan Akta.** Pembatalan akta otentik yang dianggap tidak sah karena kesalahan substansi dilakukan melalui proses litigasi. Prosedur ini melibatkan langkah-langkah berikut:
 - a. **Pengajuan Gugatan:** Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan akta.
 - b. **Pembuktian Kesalahan:** Pihak penggugat harus membuktikan adanya kesalahan substansi dalam akta dan dampaknya terhadap hak-hak mereka.
 - c. **Putusan Pengadilan:** Pengadilan akan memutuskan apakah akta tersebut dapat dibatalkan berdasarkan bukti dan argumentasi yang disampaikan.

Analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa kesalahan substansi dalam akta otentik seringkali menjadi alasan pembatalan. Dalam beberapa kasus, notaris telah diminta untuk memberikan klarifikasi atas kesalahan yang terjadi. Keputusan pengadilan memberikan preceden penting mengenai bagaimana kesalahan substansi harus ditangani dan bagaimana notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Dampak Hukum dari Pembatalan Akta

Pembatalan akta otentik karena kesalahan substansi dapat berdampak luas, termasuk;

1. **Kerugian Materiil:** Pihak yang dirugikan mungkin kehilangan hak atau mengalami kerugian finansial.
2. **Kepercayaan Publik:** Kejadian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris dan akta otentik sebagai bukti hukum.

Tinjauan pustaka ini mengulas beberapa teori dan konsep hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu mengenai jabatan notaris, akta otentik, serta pembatalan akta otentik yang mengandung kesalahan substansi.

1. **Notaris dan Akta Otentik.** Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berfungsi untuk membuat akta yang dapat dijadikan bukti yang sah. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. **Kesalahan Substansi dalam Akta Otentik.** Kesalahan substansi adalah kesalahan yang terjadi dalam penyusunan akta yang mempengaruhi isi atau materi perjanjian yang dimuat dalam akta tersebut. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktepatan notaris dalam mengonfirmasi informasi yang diberikan oleh para pihak.
3. **Implikasi Hukum atas Pembatalan Akta Otentik.** Pembatalan akta otentik di pengadilan dapat dilakukan jika terbukti bahwa akta tersebut mengandung kesalahan substansi yang dapat merugikan pihak lain. Pembatalan ini bisa mengarah pada tanggung jawab hukum notaris yang bersangkutan, baik secara perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan normatif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Penulis mengumpulkan data melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kesalahan substansi dalam akta otentik. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab notaris dan implikasi hukum dari pembatalan akta otentik yang mengandung kesalahan substansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.** Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta mencerminkan kehendak para pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab ini termasuk dalam memastikan akta bebas dari kesalahan substansi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban untuk memeriksa keabsahan data dan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. **Kesalahan Substansi dalam Akta Otentik.** Kesalahan substansi dalam akta otentik dapat berupa kekeliruan dalam mencatat informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik itu kesalahan penulisan, kesalahan tanggal, nama, atau jumlah yang tercantum dalam akta. Kesalahan ini sering terjadi karena ketidakteelitian atau kelalaian dari pihak notaris atau pihak yang memberikan informasi kepada notaris.
3. **Prosedur Pembatalan Akta Otentik.** Pembatalan akta otentik yang mengandung kesalahan substansi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan di pengadilan negeri. Proses ini biasanya dimulai dengan permohonan pembatalan akta yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan kemudian memverifikasi kesalahan substansi yang ada dalam akta dan memutuskan apakah akta tersebut dapat dibatalkan atau tidak.
4. **Implikasi Hukum Terhadap Notaris.** Jika akta otentik dibatalkan karena kesalahan substansi, notaris dapat dikenai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab tersebut bisa berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau bahkan sanksi pidana jika terbukti bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan profesi notaris. Tanggung jawab ini mencakup kerugian material maupun immateriel yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam akta.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta otentik. Kesalahan substansi yang terjadi dalam akta otentik dapat menyebabkan pembatalan akta tersebut di pengadilan. Pembatalan ini membawa implikasi hukum terhadap notaris yang dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan memastikan keabsahan setiap akta yang dibuatnya, guna menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Saran

Untuk menghindari terjadinya kesalahan substansi dalam akta otentik, disarankan agar notaris melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap data yang diberikan oleh para pihak. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap profesi notaris perlu

dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2012.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perikatan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.